

# SIARAN PERS

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI BALI**



## **PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) KABUPATEN KARANGASEM TA 2013**

**Denpasar, Senin (16 Juni 2014)** – Memenuhi ketentuan undang-undang, bertempat di Ruang Rapat Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, BPK RI melaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran (TA) 2013.

LHP atas Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari 3 (tiga) bagian yang tidak terpisahkan yakni:

1. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013 yang memuat opini;
2. LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013;
3. LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013.

Dalam LHP yang diserahkan oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI, Arman Syifa, kepada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, I Nyoman Karya Kartika, dan Bupati Karangasem, I Wayan Geredeg, **BPK RI menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2013.**

Opini tersebut diberikan mengacu pada Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa LHP yang akan diserahkan oleh BPK RI memuat opini atas Laporan keuangan. Opini yang diberikan oleh BPK RI didasarkan atas:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan yaitu penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Karangasem TA 2013 belum tertib.

Beberapa temuan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1. Tiga paket pekerjaan jalan sebesar Rp832.375.665,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan satu paket pekerjaan pemeliharaan tempat parkir sebesar Rp191.162.378,15 pada Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Karangasem tidak sesuai spesifikasi umum Bina Marga tahun 2005;
2. Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume dua paket pekerjaan peningkatan jalan dan satu paket pembangunan jalan sebesar Rp45.335.384,94 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karangasem.

### **Humas BPK RI Perwakilan Provinsi Bali**

Djatu Apriellia (Kasubbag Hukum dan Humas)

Telp : (0361) 229193

Fax : (0361) 229184, 256205

website : [www.denpasar.bpk.go.id](http://www.denpasar.bpk.go.id)

e-mail : [subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com](mailto:subbagianhukumdanhumasbali@yahoo.com)